

SKRIPSI

**ANALISIS NILAI PENDAPATAN EKONOMI KELOMPOK TANI
HUTAN SIPATUO DESA PUNDILEMO, KECAMATAN CENDANA,
KABUPATEN ENREKANG, SEBELUM DAN SETELAH ADANYA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

HASDISYAH

M011201174



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS NILAI PENDAPATAN EKONOMI KELOMPOK TANI
HUTAN SIPATUO DESA PUNDILEMO, KECAMATAN CENDANA,
KABUPATEN ENREKANG, SEBELUM DAN SETELAH ADANYA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)

Disusun dan diajukan oleh:

HASDISYAH

M011 20 1174

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

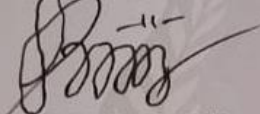
Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 19 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Ir. M. Ridwan, M.SE
NIP 19680112199403 1 001

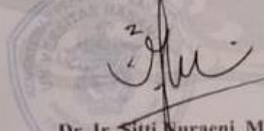
Pembimbing Pendamping



Ir. Adravanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM
NIP 19850916201807 4 001

Mengetahui:

Ketua Program studi kehutanan



Dr. Ir. Sitti Nurraeni, M.P
NIP 19680410199512 2 001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasdisyah
NIM : M011201174
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

" Analisis Nilai Pendapatan Ekonomi Kelompok Tani Hutan Sipatuo Desa
Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sebelum dan Setelah
Adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) "

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2024



Hasdisyah

ABSTRAK

Hasdisyah (M011201174). Analisis Nilai Pendapatan Ekonomi Kelompok Tani Hutan Sipatuo Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sebelum dan Setelah Adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Pengelolaan hutan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan ekonomi para pengelola perhutatan sosial. Penelitian ini berfokus pada perubahan pendapatan anggota kelompok tani sebelum dan setelah mendapatkan IUPHKm. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan mencakup data periode sebelum dan setelah adanya IUPHKm. Selanjutnya dilakukan analisis data perhitungan pendapatan melalui data produksi dan biaya. Uji paired sample t-test digunakan untuk menganalisis perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya IUPHKm menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam jumlah produksi dan pendapatan ekonomi setelah adanya IUPHKm, namun sebagian besar masih berasal dari luar kawasan HKm. Hal ini disebabkan karena keterbatasan petani dalam mengakses lokasi HKm, sehingga tidak ada penambahan jenis usaha baru setelah adanya IUPHKm. Meskipun dampak ekonomi yang diperoleh masih terbilang rendah, program perhutatan sosial memberikan dampak positif pada peningkatan pengetahuan dan wawasan baru kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya bersama dari instansi terkait dan pemerintah untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan yang dapat mendukung pemberian IUPHKm sebagai strategi untuk memaksimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan hutan sosial.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan, Perbandingan, Pendapatan, Kelompok Tani Hutan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini. Atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Nilai Pendapatan Ekonomi Kelompok Tani Hutan Sipatuo Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sebelum dan Setelah Adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)”.

Skripsi ini merupakan hasil dedikasi, kerja keras, dan perjuangan panjang yang penulis lakukan selama perjalanan pendidikan di program studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut).

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung selama kuliah hingga penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.SE** dan Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut, M.P, IPM** selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan senantiasa sabar membimbing, memberikan ilmu, serta memberikan arahan dan saran selama penyusunan tugas akhir ini. Ilmu yang diberikan Bapak/Ibu sangat berarti bagi penulis.
2. Ibu **Makarennu S.Hut, M.Si, Ph.D** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
3. Ketua Program Studi Kehutanan Ibu **Dr. Ir. Nuraeni, M.P** dan **Seluruh Dosen Pengajar** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan.
4. Keluarga tercinta, terkhusus kepada Ibunda **Hasida** dan Ayahanda **Herianto** yang banyak memberikan pengorbanan waktu serta tenaganya untuk penulis. Selalu mencurahkan doa dan kasih sayangnya, juga memberikan dorongan moral dan dukungan tanpa henti kepada penulis.

Kasih sayang dan kepercayaan kalian adalah sumber semangat penulis.

5. Kakak **Ardian Halis, S.Hut** dan Kakak **Yasmita Yaman, S.Hut** yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan selama kuliah **Keluarga Magra D**, teman-teman **Keluarga Macaca**, teman-teman **Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu**, dan teman-teman mahasiswa **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan angkatan 2020** atas dukungan dan kerjasamanya.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti, baik bagi dunia akademik maupun bagi para pembaca.

Makassar, 17 Agustus 2024

Hasdisyah

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).....	5
2.2 Kelompok Tani Hutan (KTH)	7
2.3 Konsep Pendapatan Ekonomi.....	8
2.4 Teori dan Model Analisis Ekonomi	9
III. METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	11
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	11
3.3 Populasi dan Sampel	12
3.4 Metode Pengumpulan Data	12
3.5 Analisis Data	13
3.5.1 Identifikasi Mata Pencaharian Anggota KTH Sipatuo	13
3.5.2 Analisis Nilai dan Perbandingan Pendapatan Ekonomi Anggota KTH Sipatuo.....	13
3.5.3 Analisis Implikasi Sosial Ekonomi setelah Adanya IUPHKm.....	15
3.6 Variabel Penelitian	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	16

4.1.1 Letak Geografis	16
4.1.2 Jumlah Penduduk	16
4.2 Profil Kelompok Tani Hutan Sipatuo.....	17
4.2.1 Tingkat Umur.....	17
4.2.2 Tingkat Pendidikan.....	18
4.2.3 Klasifikasi Pekerjaan	19
4.2.4 Jumlah Tanggungan Keluarga	20
4.3 Deskripsi Aktivitas Mata Pencarian KTH Sipatuo.....	21
4.4 Pendapatan KTH Sipatuo Sebelum (2018) dan Setelah (2024) adanya IUPHKm.....	23
4.5 Analisis Perbandingan Pendapatan Ekonomi KTH Sipatuo	27
4.5.1 Uji Normalitas Data.....	27
4.5.2 Uji Paired Sample T-Test	28
4.6 Implikasi Sosial dan Ekonomi Setelah adanya IUPHKm	30
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel Judul	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pundilemo berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pundilemo berdasarkan Dusun.....	17
Tabel 3. Umur Petani Anggota KTH Sipatuo	18
Tabel 4. Pendidikan Anggota KTH Sipatuo	19
Tabel 5. Pekerjaan Anggota KTH.....	20
Tabel 6. Jumlah Tanggungan Keluarga anggota KTH Sipatuo	21
Tabel 7. Jumlah Pendapatan Anggota KTH Sipatuo Sebelum IUPHKm	25
Tabel 8. Jumlah Pendapatan Anggota KTH Sipatuo Setelah IUPHKm.....	26
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk	27
Tabel 10. Hasil Uji <i>Paired Samples Statistics</i>	28
Tabel 11. Hasil <i>Paired Samples Correlations</i>	29
Tabel 11. Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian	11
Gambar 2. Diagram Aktivitas Ekonomi Anggota KTH dalam Setahun.....	22
Gambar 3. Diagram Rata-rata Pendapatan Anggota KTH dalam Setahun	24
Gambar 4. Diagram Peningkatan Total Produksi	30
Gambar 5. Diagram Produksi dari HKm dan Non-HKm.....	30
Gambar 6. Diagram Total Pendapatan dari HKm dan Non-HKm.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul	Halaman
Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	37
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	41
Lampiran 3. Profil Anggota KTH Sipatuo.....	42
Lampiran 4. Total Pendapatan Keseluruhan Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm dalam Satu Tahun	43
Lampiran 5. Total Pendapatan Anggota KTH Sebelum adanya IUPHKm dalam Satu Tahun dari Dalam dan Luar Kawasan IUPHKm	44
Lampiran 6. Total Pendapatan Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm dalam Satu Tahun dari Dalam dan Luar Kawasan IUPHKm.....	45
Lampiran 7. Pendapatan Jagung Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	46
Lampiran 8. Pendapatan Padi Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	48
Lampiran 9. Pendapatan Kakao Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	50
Lampiran 10. Pendapatan Cabai Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm.....	52
Lampiran 11. Pendapatan Cengkeh Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm.....	53
Lampiran 12. Pendapatan Aren Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	54
Lampiran 13. Pendapatan HHBK Lainnya Sebelum dan Setelah IUPHKm	56
Lampiran 14. Pendapatan Ternak Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm.....	58
Lampiran 15. Penerimaan dari Lahan Anggota KTH Sebelum adanya IUPHKm60	
Lampiran 16. Penerimaan dari Lahan Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm..	61
Lampiran 17. Penerimaan dari HHBK Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	62
Lampiran 18. Penerimaan dari Ternak Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	63
Lampiran 19. Jumlah Produksi dari Lahan Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	65
Lampiran 20. Biaya Produksi Jagung Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm.....	66
Lampiran 21. Biaya Produksi Padi Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	67

Lampiran 22. Biaya Produksi Kakao Anggota KTH Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	68
Lampiran 23. Biaya Produksi Cabai Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm.....	69
Lampiran 24. Biaya Produksi Cengkeh Anggota KTH Setelah adanya IUPHKm	71
Lampiran 25. Biaya Produksi HHBK Aren Responden Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	73
Lampiran 26. Biaya Produksi Ternak Responden Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	74
Lampiran 27. Biaya Pengeluaran Bibit Petani Responden Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	76
Lampiran 28. Biaya Pengeluaran Pupuk Petani Responden Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm.....	77
Lampiran 29. Biaya Pengeluaran Pestisida Petani Responden Sebelum dan Setelah adanya IUPHKm	78
Lampiran 30. Jumlah dan Harga Alat Pertanian Responden Sebelum adanya IUPHKm	79
Lampiran 31. Biaya Penyusutan Alat Pertanian Responden Sebelum adanya IUPHKm	79
Lampiran 32. Jumlah dan Harga Alat Pertanian Responden Setelah adanya IUPHKm	80
Lampiran 33. Biaya Penyusutan Alat Pertanian Responden Setelah adanya IUPHKm.	80
Lampiran 34. Biaya Upah Tenaga Kerja Petani Jagung Setelah adanya IUPHK..	81
Lampiran 35. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Software SPSS	83
Lampiran 36. Hasil Uji Paired Sample T-Test Menggunakan Software SPS.....	84

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumberdaya pada kawasan hutan sering kali dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan pribadi, kepentingan umum di desa, serta sebagai bahan baku kerajinan masyarakat desa. Masyarakat memandang hutan sumber penghidupan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan (HHBK) Hasil Hutan Bukan Kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan. Secara umum, masyarakat yang berada dekat dengan hutan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hasil-hasil hutan tersebut (Haryani & R. Rijanta, 2019). Berdasarkan fungsi dan perannya, hutan diklasifikasikan atas tiga jenis yakni fungsi konservasi, perlindungan, dan fungsi produksi (Saputra dkk, 2021).

Saputra dkk (2021) mengatakan bahwa definisi hutan Produksi ialah kawasan hutan dengan peruntukan utamanya ialah untuk menghasilkan berbagai produk hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan ekspor. Terdapat tiga jenis Hutan Produksi yang dikenal, yaitu Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Suatu lahan yang termasuk sebagai hutan produksi memberikan manfaat seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanaman pangan di bawah tegakan, jamur, budidaya lebah, serta penangkaran satwa. Pengelolaan hutan produksi dilakukan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kawasan, serta izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Salah satu contoh Hutan Produksi di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Hutan Produksi Desa Pundilemo dengan luas 52 hektar dengan fungsi utamanya sebagai penghasil hasil hutan baik berupa kayu juga berupa non-kayu.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pengelolaan lahan hutan secara ilegal menandakan bahwa pemanfaatan kawasan oleh masyarakat umumnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan tidak seluruhnya dipayungi oleh peraturan umum yang ada. Klaim terhadap lahan yang mereka garap sebagai tanah adat turun-temurun di kawasan hutan seringkali digunakan sebagai alasan untuk

memanfaatkan hutan, yang pada akhirnya dapat mengancam kelestarian hutan itu sendiri. Tindakan ini dianggap sebagai penyusupan atau penyerobotan hutan yang seringkali memicu konflik lahan dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan (Senoaji, 2019).

Sebagai upaya untuk mengelola hutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya, pemerintah menerapkan program perhutanan sosial (Risnawati, 2020). Pengelolaan perhutanan sosial mengacu pada upaya pemerintah dalam mengizinkan masyarakat setempat atau adat untuk mengelola kawasan hutan, baik berdasarkan hukum adat maupun dalam bentuk perizinan resmi. Perhutanan Sosial adalah bentuk pengelolaan hutan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau berdasarkan adat di kawasan hutan negara atau hutan adat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memperkuat dinamika sosial budaya. Program perhutanan sosial dilaksanakan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, serta Hutan Adat. KLHK mencatat bahwa pada tahun 2019 hingga 2024, sebanyak 239.341 KK telah diberikan izin legal agar memanfaatkan kawasan hutan di Indonesia melalui program perhutanan sosial. Upaya sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok, utamanya untuk pengembangan kegiatan dan usaha perhutanan sosial. Pada tahun 2019, kementerian memiliki target untuk membentuk dan memfasilitasi sebanyak 5.000 Kelompok Tani Hutan (KTH) (Grifaldrin dkk, 2021). Masyarakat yang memperoleh izin tersebut disebut sebagai pengelola Perhutanan Sosial (PS). Mereka bertanggung jawab dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai dengan prinsip keberlanjutan, tujuannya ialah untuk memajukan aspek sosial dan budaya masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta masih tetap melestarikan lingkungan.

Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan meningkatkan alokasi lahan yang semula sebesar 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar artinya pengelolaannya diberikan sebanyak 30% kepada masyarakat. Program perhutanan sosial memungkinkan masyarakat memiliki hak kelola lahan antara 1 sampai 2 hektar per kepala keluarga di Jawa, dan antara 4 sampai 5 hektar di luar Jawa.

Tujuan dari peningkatan akses kelola yang diberikan kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat dengan prinsip kelestarian dan keadilan.

Implementasi perhutanan sosial di beberapa lokasi yang ada di Indonesia telah menghadirkan contoh yang bermanfaat dalam pengembangan program ini. Keberhasilan pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial telah menunjukkan berbagai model seperti peningkatan nilai tambah ekonomi, pengembangan teknologi pasca panen, dan pola *off-taker*, serta akses pasar yang lebih baik untuk produk-produk seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ekowisata, produk kayu, serta komoditas perhutanan sosial seperti aren, madu, kopi, sagu, rotan, karet, coklat, kemiri, lada, tengkawang, kayu manis, biji pala, dan lainnya yang tentunya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang ada pada masyarakat setempat (Kastanya dkk, 2019).

Studi yang dilakukan oleh tim uji HKm FKMM Faswil DIY (2001) dalam Haryani & R. Rijanta (2019) menjelaskan bahwa program perhutanan sosial memungkinkan petani untuk mendapatkan tambahan lahan untuk kegiatan pertanian. Luas lahan garapan yang diberikan kepada setiap petani dalam kelompok DIY berkisar antara 0,15 hingga 0,44 hektar, sesuai dengan luas lahan hutan negara yang telah mereka garap sebelumnya. Lahan tambahan ini memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat secara subsisten, yang artinya memberikan peningkatan dalam kecukupan hidup mereka. Masyarakat desa bergantung pada sumber daya hutan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk konsumsi langsung dan tambahan konsumsi dari hasil tanaman pangan yang ditanam diantara tanaman kayu sebagai tanaman utama dalam perhutanan. Penerapan pola agroforestri atau tumpangsari dalam pengelolaan HKm memadukan pohon-pohon kayu dengan tanaman pertanian, sehingga memberikan manfaat ganda baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Pundilemo merupakan salah satu contoh pelaksanaan program perhutanan sosial yang telah dibentuk oleh masyarakat. Program hak kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundilemo telah membentuk KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang aktif dalam mengembangkan berbagai program pengusahaan hutan terutama yang hasilnya bisa

dimanfaatkan secara terus menerus seperti aren dan madu. Sejak status Hkm di KTH Sipatuo ditetapkan pada 29 Maret 2019 pengelolaan hutan oleh masyarakat telah menunjukkan banyak kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Namun, belum ada penelitian yang mengkaji seberapa jauh perkembangan dampak adanya perhutanan sosial terhadap pendapatan ekonomi anggota KTH. Penelitian ini memusatkan perhatian pada peningkatan pendapatan dan mata pencaharian berkelanjutan di KTH Sipatuo dengan mempertimbangkan sistem kelestarian serta aspek-aspek pendukung lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Informasi ini dapat menjadi bahan informasi bagi pihak pemerintah untuk mengetahui dan menilai seberapa jauh perkembangan aktivitas ekonomi akibat adanya perhutanan sosial. HKm di KTH Sipatuo Desa Pundilemo dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena belum adanya informasi mengenai perkembangan pengelolaan HKm oleh KTH Sipatuo sejak terbitnya izin.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengidentifikasi aktivitas mata pencaharian anggota KTH Sipatuo.
2. Menganalisis nilai dan perbandingan pendapatan ekonomi KTH Sipatuo sebelum dan setelah adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).
3. Analisis implikasi sosial dan ekonomi setelah adanya IUPHKm

Kegunaan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai bahan informasi baru bagi masyarakat sekitar dan instansi terkait mengenai dampak adanya pengelolaan perhutanan sosial di Desa Pundilemo yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Perhutanan sosial memperkenalkan paradigma baru bagi masyarakat, yang memungkinkan mereka tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengelola hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat melibatkan penanaman berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan syarat harus memperoleh izin atau hak dari pemerintah setempat. Izin atau hak ini memberikan jaminan kepada masyarakat dalam menjaga dan mengelola hutan di sekitarnya, karena masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan dan budaya setempat dapat menjaga dan melestarikan hutan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka (Martapani dkk, 2021).

Menurut Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 83 Tahun 2016, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh masyarakat adat atau masyarakat di sekitar hutan negara atau hutan adat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian hutan. Program ini mencakup lima bentuk kegiatan, yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Sebenarnya, konsep perhutanan sosial telah ada sejak lama, seperti dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan pola tumpang sari (Martapani dkk, 2021).

Martapani dkk (2021) menjelaskan tujuan perhutanan sosial dapat dibagi menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, fokus perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di berbagai wilayah hingga mencapai 12,7 juta hektar, atau sekitar 10% dari total luas hutan, melalui berbagai bentuk hutan sosial. Pada jangka menengah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan fasilitas untuk desa serta kehidupan masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk dari hutan yang dapat dijual di pasar. Sementara itu, dalam

jangka panjang, perhutanan sosial diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dengan mengembangkan sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang mampu bersaing di pasar global.

Menurut Susilo & Nairobi (2019), tujuan lain dari peraturan menteri tersebut adalah sebagai berikut: pertama, memberikan pedoman terkait pemberian hak pengelolaan, izin, kemitraan, serta pengelolaan hutan dalam konteks perhutanan sosial. Kedua, untuk menangani masalah kepemilikan tanah dan keadilan bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang berada di sekitar atau dalam kawasan hutan. Secara ringkas, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil tetap memastikan kelestarian hutan.

Menurut Nurindah (2021), strategi utama dalam pengembangan perhutanan kehutanan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kawasan, yang merupakan kegiatan prakondisi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan.
- 2) Kelola kelembagaan, yang dilaksanakan melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 3) Kelola usaha, yang dilaksanakan melalui kerja sama untuk mengimbangi hak dan tanggung jawab. Aktivitas ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis di ruang kerja sosial perkebunan.

Tujuan dari implementasi Hak Pengelolaan Hutan (HKm) adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan akses kepada mereka untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan mereka, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Model HKm umumnya hanya sesuai untuk pengelolaan hutan yang berukuran kecil, terutama di lokasi terpencil baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan negara oleh pemerintah. Implementasi HKm merupakan komitmen pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengintegrasikan HKm ke dalam kerangka pembangunan kehutanan sosial (Nurindah, 2021).

Kawasan hutan yang dapat digunakan sebagai Hak Pengelolaan Hutan (HKm) mencakup hutan lindung dan hutan produksi. Melalui HKm, masyarakat dapat mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) yang berlaku selama 35

tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah evaluasi. Pembangunan HKM bertujuan untuk memungkinkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan guna memastikan kelangsungan hidup mereka (Nurindah, 2021)

Kawasan hutan yang diberikan dengan adanya IUPHKM adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi. Dengan izin IUPHKM ini, pemerintah berusaha telah berupaya melibatkan penduduk sekitar sebagai mitra dalam mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui penggunaan sumber daya hutan secara efisien, adil, dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga fungsi hutan dan kelestarian lingkungan (Sulastri, 2019).

2.2 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok tani hutan sebagai sebuah kumpulan individu yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, kondisi sosial dan ekonomi, sumber daya yang dimiliki, komoditas yang diusahakan, serta kedekatan antar anggota untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka. Pertumbuhan dan pengembangan kelompok tani dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan tujuan mengubah pola pikir mereka untuk lebih berusaha dan meningkatkan kapabilitas kelompok tani dalam menjalankan perannya. Pemberdayaan petani ini dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan berbasis kelompok. Kegiatan penyuluhan yang menggunakan pendekatan kelompok bertujuan untuk mendorong pembentukan lembaga-lembaga petani yang mampu membangun kerjasama antara petani dan antar kelompok tani guna mencapai efisiensi dalam usaha mereka (Risnawati, 2020).

Kelompok tani hutan berfungsi sebagai tempat belajar mengajar bagi anggota untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri, yang dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, kelompok ini juga membantu meningkatkan kerjasama antara petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota KTH harus dipandang sebagai unit produksi yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan

menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, dan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan lebih menguntungkan (Risnawati, 2020).

Menurut Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor 57 tahun 2014, Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah sekelompok petani atau individu bersama keluarganya yang merupakan warga negara Indonesia, yang mengelola usaha di sektor kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Usaha ini mencakup kegiatan yang terkait dengan hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu, dan jasa lingkungan, baik yang dilakukan di hulu maupun hilir dari wilayah hutan tersebut (Risnawati, 2020).

2.3 Konsep Pendapatan Ekonomi

Ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam skala kecil, seperti rumah tangga. Ekonomi adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang seefektif dan seekonomis mungkin (Martapani dkk, 2021). Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, dengan fokus utama pada pengurangan tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya lebih tinggi ketika pertumbuhan ekonomi tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meliputi kekayaan alam seperti tanah, jumlah dan kualitas penduduk serta tenaga kerja di wilayah tersebut, serta sistem sosial dan sikap masyarakat (Sari, 2021).

Pendapatan, menurut Sukirno (2006:47) dalam Situmeang (2018), adalah total penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan mereka selama periode waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merujuk pada hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi, baik secara teratur maupun tidak teratur. Dalam konteks ekonomi, pendapatan merupakan modal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup sandang, pangan, pendidikan, dan kebutuhan

lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, diperlukan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dampak ekonomi dari implementasi HKM adalah meningkatnya produksi. Peningkatan ini terjadi karena pemberian izin HKM kepada petani, yang memberi mereka kepastian untuk mengelola hutan dan menggunakan sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Secara ekonomi, kepastian ini dapat meningkatkan nilai jual dari hasil-hasil yang dikembangkan di lahan hutan yang mereka kelola. Pemberian izin HKM juga memberikan kebebasan kepada petani untuk mengelola lahan tersebut tanpa kekhawatiran. Peningkatan pendapatan dari HKM didukung oleh peran aktif anggota kelompok tani dalam mengembangkan dan menjalankan program hutan kemasyarakatan. Dampak positif dari partisipasi aktif petani dapat berupa peningkatan pendapatan usaha pertanian yang signifikan dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Total pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua anggota keluarga (Martapani dkk, 2021).

2.4 Teori dan Model Analisis Ekonomi

Dalam analisis ekonomi ini, aspek ekonomi seperti pendapatan, biaya produksi, dan efisiensi dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja sebuah usaha. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah analisis biaya dan manfaat. Dalam metode ini, seluruh biaya produksi yang terkait dengan usaha diperhitungkan, termasuk bahan baku, tenaga kerja, operasional, dan modal. Di sisi manfaat, pendapatan yang diperoleh dari hasil jasa atau produk dievaluasi. Selain itu, manfaat sosial seperti pengurangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan dapat dimasukkan dalam analisis ini (Simbolon, 2023).

Keberlanjutan sebuah usaha dapat dinilai melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi berkelanjutan terkait dengan kemampuan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang mencukupi dalam jangka panjang. Hal ini meliputi evaluasi terhadap profitabilitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Selain itu untuk mengukur seberapa baik usaha tersebut menghasilkan keuntungan finansial, dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan dengan biaya produksi, juga menggunakan analisis

rasio keuangan seperti rasio laba kotor, rasio laba bersih, dan pengembalian modal investasi (Simbolon, 2023).

Disebutkan pula dalam Simbolon (2023) bahwa dengan melakukan analisis ekonomi, para pengambil keputusan dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang keberlanjutan dan profitabilitas usaha maupun jasa. Informasi yang diperoleh ini dapat digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan usaha agar lebih berkelanjutan serta mengidentifikasi area dimana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas. Analisis ekonomi digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan profitabilitas usaha tani dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi lainnya yang terlibat dalam sebuah produksi. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam analisis ini:

1. Menghitung pendapatan dan biaya produksi, dengan melakukan pengumpulan data tentang pendapatan yang dihasilkan dari sebuah usaha dan biaya yang terkait dengan produksi. Pendapatan bisa berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Biaya produksi mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya modal seperti investasi dalam peralatan atau infrastruktur.
2. Menganalisis rasio keuangan dengan data hasil perhitungan setelah memperoleh data pendapatan dan biaya produksi, gunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi profitabilitas usaha tani. Beberapa rasio yang relevan termasuk rasio laba kotor (*gross profit ratio*), rasio laba bersih (*net profit ratio*), dan pengembalian modal investasi (*return on investment*). Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien usaha tani dalam menghasilkan keuntungan.

komponen utama dalam analisis ekonomi berupa permintaan dan penawaran. Analisis ekonomi usaha meliputi pemahaman mengenai pola permintaan dan penawaran untuk produk usaha maupun jasa.